

LAPORAN PELAKSANAAN RESES
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
MASA RESES PERTAMA TAHUN SIDANG 2024/2025

Disampaikan oleh : Muhammad Naryoko, S.Fil.I., M.S.I.

Dalam : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah

Hari/Tanggal : 30 Desember 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yth. Saudara PJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Yth. Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah,

Yth. Segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah,

Yth. Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,

Yth. Rekan-rekan Wartawan, dan Segenap Tamu Undangan yang Berbahagia.

Pendahuluan

Mengawali laporan hasil pelaksanaan reses Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2023/2024, marilah kita bersama menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Hasil Pelaksanaan Reses

Berikut adalah hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan selama masa reses pertama tahun sidang 2023/2024:

1. Kurangnya Pemerataan Daya Listrik di Desa

Sebagian daerah di Jawa Tengah masih menghadapi kurangnya daya listrik yang memadai untuk mendukung aktivitas UMKM. Kondisi ini menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Pemerintah diharapkan lebih serius dalam meningkatkan kapasitas dan pemerataan pasokan listrik untuk mendorong perkembangan UMKM serta kesejahteraan masyarakat.

2. Peran Santri dan Pendidikan dalam Kemajuan Desa

Santri sebagai bagian masyarakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan desa, terutama dalam pendidikan dan nilai-nilai moral. Pemerintah diharapkan mendukung program pendidikan berbasis komunitas dan pesantren untuk meningkatkan kualitas SDM di desa-desa.

3. Pendataan Warga Penerima Bantuan yang Tidak Obyektif

Pendataan penerima bantuan sering dilakukan berdasarkan selera pribadi pendata atau saran atasan tanpa kriteria yang jelas. Hal ini menyebabkan bantuan sering tidak tepat sasaran. Pemerintah diharapkan melakukan verifikasi faktual terhadap data yang diusulkan untuk memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan.

4. Minimnya Dukungan terhadap Potensi Desa Wisata

Potensi desa wisata di Jawa Tengah belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Padahal, pengembangan desa wisata yang baik dapat meningkatkan perekonomian setempat. Pemerintah provinsi diharapkan melakukan inventarisasi dan memberikan dukungan agar desa wisata berkembang pesat.

5. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Belum Optimal

Program RTLH disambut baik oleh masyarakat miskin, tetapi implementasinya sering tertunda. Sosialisasi dan koordinasi yang lebih baik dari pemerintah provinsi diperlukan agar program ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

6. Kelangkaan Pupuk di Musim Tanam

Distribusi pupuk yang tidak tertata dengan baik terus menjadi keluhan petani. Kelangkaan ini menghambat produksi pertanian, terutama saat musim tanam. Penataan distribusi dan pengelolaan pupuk harus menjadi prioritas pemerintah agar petani tidak lagi kesulitan.

7. Harga Hasil Pertanian yang Tidak Stabil

Harga hasil pertanian yang sering anjlok membuat petani tidak bersemangat melanjutkan profesinya. Penetapan standar harga oleh

pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

8. Kurangnya Penyuluhan dan Pendampingan bagi Petani

Penyuluh pertanian seharusnya menjadi pendukung utama petani dalam bercocok tanam. Pemerintah diharapkan mengintensifkan penyuluhan pertanian melalui koordinasi dinas terkait, sehingga hasil panen dapat lebih berkualitas dan produktivitas meningkat.

9. Kerusakan Infrastruktur Jalan dan Faktor Penyebabnya

Jalan rusak, terutama di jalur Pantura, menjadi masalah besar karena menyebabkan kecelakaan, kerugian ekonomi, dan kemacetan. Faktor penyebabnya meliputi kelebihan tonase kendaraan, kualitas pembangunan jalan yang buruk, serta pengaruh banjir. Diperlukan ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran dan memperbaiki kualitas pembangunan jalan.

10. Pengelolaan Banjir dan Rob yang Masih Lemah

Sedimentasi sungai, sampah, serta rob tahunan di pesisir utara Jawa Tengah memicu banjir dan kerugian masyarakat. Pemerintah diharapkan melakukan normalisasi sungai dan langkah serius dalam mengatasi rob, agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak bencana ini.

Rekomendasi Umum

Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah disampaikan:

1. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

- Memastikan koordinasi intensif dengan pihak eksekutif untuk merealisasikan aspirasi masyarakat.

- Mempercepat pelaksanaan program prioritas di bidang infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

2. Fraksi PPP Mendorong:

- Sosialisasi program bantuan sosial berbasis data terpadu untuk memastikan keadilan distribusi.
- Kebijakan pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan.

Penutup

Demikian laporan hasil pelaksanaan reses ini disampaikan. Semoga aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui kegiatan reses dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah. Fraksi PPP berkomitmen untuk terus menjembatani kepentingan masyarakat dengan Pemerintah Provinsi demi tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua

ttd

Muhammad Naryoko, S. Fil.I., M.S.I.

Sekretaris

ttd

dr. Hj. Sholeha Kurniawati